



MODEL PEMBANGUNAN PETERNAKAN INDONESIA



OLEH :

Hj. NURAENI, S.Sos. M.Si

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Demokrat

PENGATAR

Konsep kebijakan pembangunan peternakan Indonesia pada saat ini telah bergeser dari paradigma pembangunan yang **sentralistik** menuju pada konsep pembangunan **partisipatoris**. Konsep partisipatoris secara operasional formal diwujudkan dalam bentuk kelompok-kelompok ternak. Kelompok ternak merupakan perwujudan modal sosial di masyarakat yang penting dalam pembangunan masyarakat peternak khususnya dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga.

KONSEPSI KEBIJAKAN

Konsep kebijakan yang partisipatoris dalam pembangunan peternakan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga yang berbasis pada kesehatan keluarga, penerimaan, dan pendapatan selain untuk faktor produksi.

TANGGUNG JAWAB

Pembangunan peternakan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan produk peternakan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam dan merata.



POTENSI LAHAN UNTUK PETERNAKAN

NO	JENIS LAHAN	LUAS LAHAN (000 HA)		% LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN
		POTENSI	TELAH TERMANFAATKAN	
1	Perkebunan Sawit (Terintegrasi)	2850	104	3,64
2	Kehutanan	200	0,25	0,13
3	Padang Penggembalaan dan ex .Tambang	500	6,0	1,20

Sumber : (dirjen ternak kementan, 2016)

REVISI KEBIJAKAN PENYEDIAAN LAHAN

- a. Permen LHK P50/2016, Pasal 4 pada butir m khusus untuk pangan tertentu dan energi, dapat menggunakan Kawasan Hutan Produksi dengan pola pinjam pakai. Diusulkan “pangan tertentu” termasuk didalamnya gula/tebu, peternakan sapi dan jagung serta kedelai.
- b. Pada Lampiran PP 33/2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP sewa lahan dengan pola pinjam pakai untuk HP = Rp. 1,6 Juta/Ha/Th. Diusulkan khusus untuk Pertanian Strategis (tebu, sapi dan Pajale) ditetapkan PNBP Rp.0 untuk rakyat dan maksimal Rp. 500 Ribu/Ha/Thn.
- c. Diusulkan Revisi Permen Keuangan 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri (dan pertanian dalam arti luas) dalam rangka Penanaman Modal. Sehingga memungkinkan pemasukan sapi indukan juga mendapatkan fasilitas bea masuk 0%.
- d. Pergub yang mewajibkan perkebunan kelapa sawit diintegrasikan dengan sapi.

LANGKAH-LANGKAH

- a. Percepatan pengesahan PERDA RT/RW bagi provinsi yang belum menetapkan.
- b. Percepatan pengesahan ijin kerjasama pemanfaatan lahan Perhutani, Inhutani, KPH dan BUMN lainnya.
- c. Diusulkan agar Presiden membuat Tim khusus (Independen) untuk mengevaluasi lahan HGU terlantar dan lahan yang sudah keluar ijin lokasi dai para Bupati tetapi tidak diproses lebih lanjut oleh investor yang bersangkutan, untuk kemudian dialihkan kepada investor yang lain yang serius berinvestasi
- d. Pemerintah perlu membentuk Lembaga Perwalian untuk mengontrol kemitraan inti-plasma, agar menjamin berkelanjutan dan tidak ada eksploitasi diantara partisipan terkait.
- e. Pemetaan lahan yang sesuai untuk investasi peternakan sapi.
- f. Pencabutan Ijin Lokasi HPK yang lebih dari 3 Tahun Tidak di proses
- g. Pencabutan HTI yang terlantar & dirubah peruntukkannya untuk Sapi
- h. Pencabutan HGU terlantar, baik BUMN maupun Swasta
- i. Percepatan Proses Perijinan, mulai dari ijin lokasi, ijin HGU dan IUP

GAMBARAN PETERNAKAN INDONESIA SAAT INI

Dalam kurun waktu 5 tahun produksi daging dan telur nasional meningkat, namun susu turun sebesar 0,19%. Produksi daging nasional meningkat sebesar 6,25% yang berasal dari kontribusi hampir seluruh komoditi, kecuali kambing dan domba yang turun masing-masing 1,60% dan 3,93%. Demikian juga produksi telur meningkat 6,78%. Selama kurun waktu 5 tahun (2010-2014), realisasi produksi daging, telur dan susu dibandingkan dengan sasaran dalam Renstra 2010-2014 masing-masing mencapai 110,47%, 97,20%, dan 74,19%. Produksi daging nasional berasal dari kontribusi ternak besar, ternak kecil dan unggas; sedangkan produksi telur nasional berasal dari kontribusi telur ayam buras, ayam ras, itik, burung puyuh, dan itik manila

POPULASI SAPI DAN KERBAU

Berdasarkan data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 populasi sapi dan kerbau saat ini berjumlah 16,7 juta ekor. Tetapi berdasarkan hasil PSPK (2011) dan Sensus Pertanian 2013 (ST2013) populasi sapi dan kerbau terjadi penurunan yaitu dari 16,1 juta ekor menjadi 13,7 juta ekor atau menurun 7,29 persen.

LANJUTAN

Sebaran populasi sapi dan kerbau tersebut adalah sebagian besar menumpuk di pulau Jawa yaitu 45,7% dan pulau Sumatera 19,5%; diikuti pulau Bali dan Nusa Tenggara 15,2%; Sulawesi 14,4%; Kalimantan 3,2%; Maluku dan Papua sebesar 2,1% (sumber PSPK Tahun 2011). Sebaran populasi ini di pulau Jawa yang lahannya relatif sempit telah menjadi konsentrasi sapi dan kerbau Indonesia. Sedangkan pulau di Maluku dan Papua yang memiliki lahan lebih luas populasi sapi dan kerbau hanya 2,1% sehingga ketimpangan struktur populasi ini harus diperbaiki.

KEBUTUHAN DAGING

Pada saat ini kebutuhan daging berkisar 653 ribu ton. Sebagaimana telah disebutkan bahwa penyediaan ini berasal pada umumnya dari usaha penggemukan. Namun usaha penggemukan tersebut berasal dari 23,79% peternakan rakyat, dan impor sapi bakalan oleh asosiasi swasta serta impor daging dan jeroan dari Asosiasi Importir Daging. Kebutuhan daging ini terus akan meningkat sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan timbulnya kelas menengah dan bonus demografi yang akan terjadi puncaknya pada tahun 2025-2030.

PENYEDIAAN DALAM NEGERI

Berdasarkan perhitungan dan analisis supply demand daging menunjukkan bahwa penyediaan dalam negeri saat ini berjumlah hanya 436 ribu ton atau 57% dari total kebutuhan. Rendahnya penyediaan dalam negeri akibat dari pertumbuhan populasi dari ternak lokal yang belum optimal dan di lain pihak kesadaran masyarakat semakin tinggi sehingga produksi lokal belum sesuai yang diharapkan. Produktivitas ternak lokal tersebut ditunjukkan dari angka kelahiran dan calfcrop dan penambahan berat badan yang lebih rendah dari ternak impor.

IMPOR

Penyediaan daging dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan daging. Untuk pemenuhannya telah dilakukan impor sebesar 217 ribu ton atau 33% dari kebutuhan. Impor tersebut berasal dari sapi bakalan, sapi siap potong, daging, prime-cut, secondary cut dan jeroan. Impor sapi bakalan dan daging secara reguler dilakukan, sedangkan impor sapi siap potong dan jeroan dilakukan pada saat krisis harga yang meningkat di sentra pasar.

KARAKTERISTIK PETERNAKAN DI INDONESIA

Peternakan Unggas Peternakan unggas secara garis besar terbagi atas dua macam yaitu **peternakan komersial** dalam berbagai skala usaha dan **peternak tradisional (non komersial)**. Hampir semua peternak komersial memelihara ayam ras (broiler dan petelur) dan sebaliknya hampir semua peternak tradisional memelihara ayam kampung. Peternak komersial secara fungsional terbagi atas peternak pembibitan (breeder) sebagai penghasil bibit/benih dan peternak budidaya sebagai penghasil ayam siap potong dan telur konsumsi.

MODEL PETERNAKAN INDONESIA UNTUK HASIL TERBAIK

- a. Pengadaan sumber pakan yang cukup, baik untuk sumber protein maupun energi, untuk kebutuhan peningkatan populasi unggas dalam hal ini adalah ayam ras. Hal ini disebabkan karena ayam ras adalah produsen telur dan daging segar sebagai sumber protein hewani termurah, harga terjangkau dan jaringan pemasaran yang telah mencapai pedesaan.
- b. Pengadaan sumber pakan hijauan dan konsentrat atau pakan lengkap bagi sapi potong yang jumlahnya akan terus ditingkatkan. Pasar daging sapi walaupun saat ini masih terus tertekan oleh daging ayam, tetapi akan bertahan pada tahapan tertentu yang sulit digeser oleh daging ayam. Daging sapi merupakan bahan utama pembuatan bakso, sebagai produk protein hewani dengan harga murah, terjangkau masyarakat dengan jaringan pasar yang mencapai pedesaan.

LANJUTAN

c. Sumber bibit atau DOC bagi ayam sampai saat ini akan cukup tersedia karena didukung oleh pihak swasta bermodal kuat dan merupakan pengusaha lintas negara. Tetapi untuk sapi potong perlu dibangun suatu sistem pembibitan sapi lokal atau ex-impor yang secara bertahap akan meningkatkan populasi sapi potong di Indonesia.

d. Susu yang dihasilkan oleh sapi perah dalam sistem pemasarannya di Indonesia dalam penentuan harga didominasi oleh IPS, demikian pula jaringan pemasaran dikuasai oleh IPS. Oleh karena itu, prioritas penanggulangannya adalah kelembagaan pasar yang lebih adil dan bijaksana (fairness policy).

LANJUTAN

- a. Penjaringan sapi bakalan dari peternak tradisional dapat diperankan oleh swasta untuk dikembangkan pada wilayah sumber pakan di atas. Demikian pula penjaringan sapi induk produktif yang berlebih dari peternak tradisional dapat dijaring oleh swasta tersebut. Cara lainnya adalah dengan memudahkan para peternak tradisional untuk akses terhadap modal baik yang berasal dari perbankan atau sumber lain agar mereka dapat berkembang menjadi peternak komersial. Diharapkan para peternak tradisional juga dapat meningkatkan efisiensi proses produksi dalam menghasilkan sapi bakalan maupun sapi bibit di peternakannya.

TERIMA KASIH